

BAB IV PENUTUP

4.1 Keberhasilan Kinerja Sasaran Strategis

Berikut ini adalah keberhasilan yang dicapai Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2017 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis pertama Meningkatnya jumlah cadangan pemerintah dengan indikator :
 - Persentase Cadangan Pangan Pemerintah dengan realisasi 27 Ton, atau capaian realisasi 54%
2. Sasaran Strategis kedua “Bertambahnya Jumlah Desa Mandiri Pangan” dengan indikator :
 1. Pembentukan Desa Mapan, dengan realisasi 2 desa atau capaian realisasi 66,67 %
 2. Pemberdayaan Masyarakat di desa Rawan Pangan, dengan realisasi 2 desa atau capaian realisasi 66,67 %
3. Sasaran Strategis ketiga “Meningkatnya kelancaran dan pemerataan distribusi pangan ke masyarakat” dengan indikator :
 - Meningkatnya Ketersediaan Informasi, pasokan harga, distribusi dan Akses Pangan, dengan realisasi 1 laporrn untuk masing-masing kegiatan atau capaian realisasi 100 %
4. Sasaran Strategis keempat Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5% diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati dengan indikator :
 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH), dengan realisasi 88,40 atau capaian realisasi 93,05 %
5. Sasaran Strategis kelima Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen.dengan indikator :
 - Jumlah Komoditi Pangan Segar yang aman dikonsumsi di Babel, dengan realisasi 78 atau capaian realisasi 123,81%

6. Sasaran Strategis keenam “Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD dengan indikator :

- Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD 100%, dengan realisasi 100%.

4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Sasaran

Walaupun secara umum Pemerintah sudah mampu menyediakan pangan dan mendistribusikannya secara merata keseluruh daerah, sehingga pangan mudah dijangkau, tetapi belum menjadi Jaminan bahwa seluruh penduduk Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 yang berjumlah 1.223.296 jiwa, dapat memenuhi kebutuhan pangannya dalam jumlah yang cukup, bermutu, bergizi, berimbang, aman dan halal sebagaimana di amanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, karena pada kenyataannya masih terdapat permasalahan mendasar terkait ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal tersebut bisa terlihat dari :

- a. Hasil pemetaan kerawanan pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tahun 2015 menunjukkan masih ada desa/kelurahan yang termasuk dalam kategori sangat rawan pangan sampai rawan pangan, yaitu dari 381 desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 59 desa kategori sangat rawan pangan dan 26 desa kategori rawan pangan, tersebar di 4 Kabupaten/kota.baik yang bersifat kronis maupun transien.
- b. Bencana banjir dalam beberapa tahun terakhir selalu dialami di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi permasalahan tersendiri dalam penanganan darurat ketersediaan pangan.
- c. Masih banyaknya permasalahan terkait keamanan dan mutu pangan segar yang beredar di masyarakat.
- d. Tingkat Inflasi daerah yang bersumber dari fluktuasi harga bahan makanan rentan terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena permasalahan distribusi pangan terutama karena tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pangan pokok dari luar daerah.

- e. Pola konsumsi pangan masyarakat yang masih di bawah target harapan, dimana skor PPH baru mencapai 88,4 point, dari target sebesar 95 point. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena keseimbangan pola makan mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat.

4.3. Langkah Antisipasi

Permasalahan mendasar urusan pangan dijadikan Isu Strategis penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan 2017 – 2022, yaitu Rentannya tingkat ketahanan pangan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. Adapun strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam menghadapi isu tersebut adalah :

Arah dan Kebijakan yang dimaksud meliputi:

A. Strategi 1 :

Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan 1

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

B. Strategi 2 :

Meningkatkan sistem distribusi pangan untuk mengembangkan akses pangan dan stabilisasi harga.

Arah Kebijakan 2

Stabilitas harga pangan strategis

C. Strategi 3:

Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal.

Arah Kebijakan 3

Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan

D. Strategi 4 :

Meningkatkan kesadaran mutu dan keamanan produk pangan kepada pelaku usaha bidang pangan, serta konsumen.

Arah Kebijakan 4

Melakukan pembinaan mutu dan keamanan pangan serta mengembangkan sertifikasi dan pengawasan batas maksimum residu (BMR) pada produk pangan segar.

E. Strategi 5:

Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam, pengembangan sumberdaya dan infrastruktur pangan.

Arah Kebijakan 5

Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam melalui pengembangan sumberdaya, infrastruktur pangan serta membangun kerjasama lintas sektoral antar pemerintah, BUMN, BUMD, dan lembaga masyarakat.

F. Strategi 6 :

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan

Arah Kebijakan 6

Peningkatan ketahanan dan penanganan kerentanan pangan di masyarakat

G. Strategi 7:

Meningkatkan pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

Arah Kebijakan 7

Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

Selain dengan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diharapkan, Dinas Pangan akan selalu mengintegrasikan program kegiatan tersebut dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas (organisasi perangkat daerah) lainnya, karena tingkat keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatnya Ketersediaan pangan yang beragam” justru lebih banyak

diperoleh dari kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai program kegiatan lintas Organisasi Perangkat Daerah dan wilayah.